

ANALYSIS OF VILLAGE DEMOCRACY PRINCIPLES IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT IN VILLAGE PINANG SEBATANG DISTRICT TUALANG REGENCY OF SIAK

Norkolis¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

Email: norkolis1995@gmail.com¹, linda_sri@yahoo.com², jumili_arianto@yahoo.com³

No. Hp: 082330667597

Education Studies Program Pancasila and Citizenship
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University

Abstract: This research is based on the phenomenon of the implementation of the principle of village democracy, namely the lack of transparency in RT elections that are not in accordance with the procedures and election requirements mentioned in the Siak Regency Regulation no. 7 of 2010 on the amendment of Local Regulation no. 15 Year 2007 on social institutions. RT selection through deliberation but it is not executed. The formulation of the problem is How the implementation of the principle of village democracy in governance in Village Pinang Sebatang according to the perception of government and society and how the Government of Village Pinang Sebatang in building democratization of the village according to the perception of government and society. This study aims to determine the implementation of the principle of village democracy according to the perception of government and society. As well as the Village Pinang Sebatang Village's efforts to build village democracy according to the government and society. Respondent that is 40 people by using technique of Purposive Sampling. Techniques of collecting data through observation, questionnaires, interviews, and documentation. The research method is quantitative descriptive method. Based on the result of research, the implementation of village democracy principle is in good category (51% - 100%) that is according to government perception 96% and society perception 69%. While efforts to build village democratization are in the category of existing efforts (51% - 100%), that is according to the perception of the village government by 96% and the public perception of 61%.

Keywords: Principles of Village Democracy

ANALISIS TENTANG PRINSIP DEMOKRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

Norkolis¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

Email : norkolis1995@gmail.com¹, linda_sri@yahoo.com², jumili_arianto@yahoo.com³

No. Hp : 082330667597

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak : Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena pelaksanaan prinsip demokrasi desa yaitu kurangnya keterbukaan dalam pemilihan RT yang tidak sesuai prosedur dan persyaratan pemilihan yang disebutkan didalam Perda Kabupaten Siak No. 7 Tahun 2010 tentang perubahan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan. pemilihan RT melalui musyawarah akan tetapi hal tersebut tidak dijalankan. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimana pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang menurut persepsi pemerintah dan masyarakat dan bagaimana upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip demokrasi desa menurut persepsi pemerintah dan masyarakat. Serta upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut pemerintah dan masyarakat. Responden yaitu 40 orang dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian yaitu metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan prinsip demokrasi desa berada dalam kategori baik (51% - 100%) yaitu menurut persepsi pemerintah sebesar 96% dan persepsi masyarakat sebesar 69%. Sedangkan Upaya membangun demokratisasi desa berada dalam kategori ada upaya (51% - 100%), yaitu menurut persepsi pemerintah sebesar 96% dan persepsi masyarakat sebesar 61%.

Kata Kunci : Prinsip Demokrasi Desa

PENDAHULUAN

Didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang ada di wilayah kabupaten memiliki otonomi sendiri layaknya tingkat pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/kota. Dalam menjalankan pemerintahan desa selain dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk demokrasi ditingkat desa. Pelaksanaan demokrasi tidak hanya dilakukan di pemerintahan pusat saja melainkan juga dilaksanakan di pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan oleh Brian C. Smith (Marijan Kancung, 2010), munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan persyaratan bagi munculnya demokrasi ditingkat nasional. Melalui penetapan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, merupakan langkah awal dari proses demokratisasi ditingkat desa.

Perkembangan baru menunjukkan bahawa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup. Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah sesuatu yang *“taken for granted”*. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis (Busrizalti, 2013).

Pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi harus diorientasikan bagi kemajuan kolektif masyarakat setempat, yaitu masyarakat desa, bukan demi demokrasi itu sendiri. Sehingga tujuan demokratisasi desa dapat mewujudkan kemajuan bagi masyarakat itu sendiri sebagai tujuan utama pembangunan desa. Dalam pelaksanaan demokrasi di desa harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi desa, yaitu kepentingan masyarakat, musyawarah, partisipasi, sukarela, toleransi, perikemanusiaan, berkeadilan gender, serta transparan dan akuntabel (Marwan Jaffar, dkk, 2015).

Berdasarkan prasarvey dan dialog penulis terdapat kesan kuat terhadap demokrasi. Demokrasi desa cenderung dipahami dan hanya diukur dari pemilihan yang demokratis. Pemilihan penghulu dan badan perwakilan seperti Badan Permusyawaratan Kampung merupakan bukti konkrit kecenderungan itu. Masyarakat mempunyai kebiasaan memberikan mandat dan kepercayaan kepada tokoh (pemuka) masyarakat untuk mengambil prakarsa dan keputusan. Fenomena selanjutnya yaitu kurangnya keterbukaan dalam pemilihan RT yang tidak sesuai prosedur pemilihan yang disebutkan didalam Perda Kabupaten Siak No. 7 Tahun 2010 tentang perubahan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan Pasal 10 Ayat 3 disebutkan Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Dusun / Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat. Sedangkan yang terjadi pemilihan RT tidak melalui musyawarah melainkan ditetapkan oleh Kepala Dusun. Adapun rumusan masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang menurut persepsi pemerintah kampung? (2) Bagaimana pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang menurut persepsi masyarakat? (3) Bagaimana upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi pemerintah kampung? (4) Bagaimana upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun

demokratisasi desa menurut persepsi masyarakat?. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menurut persepsi pemerintah kampung. (2) untuk mengetahui pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menurut persepsi masyarakat (3) Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi pemerintah kampung. (4) Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi masyarakat. Manfaat penelitian adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, menjadi bahan kajian bagi Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Pinang sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Serta dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya terutama bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis .

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh masyarakat Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang memiliki penduduk yang tercatat didalam 667 KK (sumber Kampung Pinang Sebatang).

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Dengan demikian yang dijadikan sampel adalah perangkat desa (Penghulu, Kerani, 3 Juru Tulis, 2 Kaur, 3 Staf, 4 Kepala Dusun, dan 5 RK), 11 orang BAPEKAM (Ketua dan 10 Anggota), serta 10 masyarakat Kampung Pinang Sebatang, sehingga keseluruhan jumlah sampel adalah 40 orang.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase atau distribusi frekuensi. Data yang diperoleh dari responden disusun dalam table-tabel (tabulasi) selanjutnya dilakukan penilaian analisis persentase (%) dan disimpulkan berdasarkan setiap jawaban responden yang diajukan dalam angket. Untuk

mencari persentase dari frekuensi data dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Sampel Penelitian

100% = Ketetapan (Anas Sudjana, 2001).

Untuk mengetahui analisis tentang prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan tualang kabupaten Siak, memiliki dua alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut:

1. Ya
2. Tidak

Dalam pengambilan kesimpulan pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan, adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila responden yang menjawab (Ya) 51% - 100% = Baik
2. Apabila responden yang menjawab (Ya) 0% - 50% = Tidak Baik (Sutrisno Hadi, 2004).

Dalam pengambilan kesimpulan upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi Desa, hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan, adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila responden yang menjawab (Ya) 51% - 100% = Ada
2. Apabila responden yang menjawab (Ya) 0% - 50% = Tidak Ada (Husaini dan Purnomo, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai analisis tentang prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, adapun hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menurut persepsi pemerintah kampung

Dari jawaban keseluruhan responden berdasarkan sub indikator maka dapat direkapitulasi sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten siak dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Rekapitulasi jawaban responden tentang pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang menurut persepsi pemerintah kampung

Sub Indikator	Jawaban Responden			
	Ya		Tidak	
	F	%	F	%
Kepentingan Masyarakat	30	100	0	0
Musyawaharah	28	93	2	7
Partisipasi	27	90	3	10
Sukarela	30	100	0	0
Toleransi	27	90	3	10
Perikemanusiaan	30	100	0	0
Berkeadilan Gender	29	97	1	3
Transparan dan Akuntabel	28,5	95	1,5	5
Jumlah	230	765	10,5	35
Rata-rata	29	96	1	4

Sumber: Data olahan tahun 2017

Tabel 1. menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menurut persepsi pemerintah kampung. Diperoleh data bahwa rata-rata sebanyak 96% menyatakan Ya, dilihat dari jawaban yang menjawab Ya tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada sub indikator prinsip kepentingan masyarakat sebesar 100%, sukarela sebesar 100%, dan perikemanusiaan sebesar 100%. Sedangkan rata-rata sebanyak 4% menyatakan Tidak, dilihat dari jawaban yang menjawab Tidak tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada sub indikator prinsip partisipasi sebanyak 90% dan prinsip toleransi sebanyak 90%. Berdasarkan hasil penelitian dan tolak ukur, bahwa sebanyak 96% responden menjawab ya yang berada pada kategori baik antara 51% - 100%, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan pemerintah kampung yang menyatakan Ya berpendapat bahwa pemerintah kampung Pinang Sebatang telah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi desa, seperti Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), kebebasan menyampaikan aspirasi,

dan keterbukaan informasi mengenai kebijakan kampung. Sedangkan responden yang menyatakan Tidak berpendapat bahwa pemerintah kampung Pinang Sebatang kurang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi desa, seperti kurangnya musyawarah dalam menentukan pelaksana proyek strategis kampung dan keterbukaan mengenai pengangkatan aparatur pemerintahan kampung.

2. Pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menurut persepsi pemerintah kampung

Dari jawaban keseluruhan responden berdasarkan sub indikator maka dapat direkapitulasi sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten siak dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Rekapitulasi jawaban responden tentang pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang menurut persepsi masyarakat

Sub Indikator	Jawaban Responden			
	Ya		Tidak	
	F	%	F	%
Kepentingan Masyarakat	10	100	0	0
Musyawarah	6	60	4	40
Partisipasi	5	50	5	50
Sukarela	10	100	0	0
Toleransi	3	30	7	70
Perikemanusiaan	8	80	2	20
Berkeadilan Gender	7	70	3	30
Transparan dan Akuntabel	6,5	65	3,5	35
Jumlah	55,5	555	24,5	245
Rata-rata	7	69	3	31

Sumber: Data olahan tahun 2017

Tabel 2. menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menurut persepsi masyarakat. Diperoleh data bahwa rata-rata sebanyak 69% menyatakan Ya, dilihat dari jawaban yang menjawab Ya tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada sub indikator prinsip kepentingan masyarakat sebesar 100% dan prinsip sukarela sebesar 100%. Sedangkan rata-rata sebanyak 31% menyatakan Tidak, dilihat dari jawaban yang menjawab Tidak tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada sub indikator prinsip toleransi sebesar 70%. Berdasarkan hasil penelitian dan tolak ukur, bahwa sebanyak 69% responden menjawab ya yang berada pada kategori baik antara 51% - 100%, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip demokrasi desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan pemerintah kampung yang menyatakan Ya berpendapat bahwa Pemerintah Kampung Pinang Sebatang telah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi desa, seperti pembangunan berdasarkan kepentingan masyarakat contohnya pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Serta berkeadilan gender dalam pengangkatan aparatur pemerintah kampung. Sedangkan responden yang menyatakan Tidak berpendapat bahwa pemerintah kampung Pinang Sebatang kurang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi desa, seperti kurangnya musyawarah dalam pemilihan kepala Dusun dan RT dan pemerintah kampung lebih mendahulukan pendapat tokoh masyarakat.

3. Upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi Pemerintah Kampung Pinang Sebatang

Dari jawaban keseluruhan responden berdasarkan sub indikator maka dapat direkapitulasi sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Rekapitulasi upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi Pemerintah Kampung Pinang Sebatang

Sub Indikator	Jawaban Responden			
	Ya		Tidak	
	F	%	F	%
Mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa	28	94	2	6
Mengawasi kadar prinsip demokrasi desa	30	100	0	0
Mengembangkan kultur demokrasi	28,5	95	1,5	5
Jumlah	86,5	289	3,5	11
Rata-rata	29	96	1	4

Sumber: Data olahan tahun 2017

Tabel 3. menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi Pemerintah Kampung Pinang Sebatang. Diperoleh data bahwa rata-rata sebanyak 96% menyatakan Ya, dilihat dari jawaban yang menjawab Ya tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada sub indikator mengawasi kadar prinsip demokrasi desa yaitu sebesar 100%. Sedangkan rata-rata sebanyak 4% menyatakan Tidak, dilihat dari jawaban yang menjawab Tidak tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada sub indikator mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa yaitu sebesar 6%. Berdasarkan hasil penelitian dan tolak ukur, bahwa sebanyak 96% responden menjawab ya berada dalam kategori baik yang

terletak antara 51% - 100%, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang untuk membangun demokratisasi desa.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan pemerintah kampung yang menyatakan Ya berpendapat bahawa ada upaya pemerintah kampung Pinang dalam membangun demokratisasi desa, seperti pemilihan Penghulu dan BAPEKAM secara independen dan demokratis. Sedangkan responden yang menyatakan Tidak berpendapat bahwa kurang ada upaya pemerintah kampung Pinang dalam membangun demokratisasi desa. Seperti kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pemilihan anggota BAPEKAM.

4. Upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi Pemerintah Kampung Pinang Sebatang

Dari jawaban keseluruhan responden berdasarkan sub indikator maka dapat direkapitulasi sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini :

Tabel 4. Rekapitulasi upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa Menurut Persepsi Masyarakat Kampung Pinang Sebatang

Sub Indikator	Jawaban Responden			
	Ya		Tidak	
	F	%	F	%
Mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa	7	67	3	33
Mengawasi kadar prinsip demokrasi desa	6	60	4	40
Mengembangkan kultur demokrasi	5,5	55	4,5	45
Jumlah	18,5	182	11,5	118
Rata-rata	6	61	4	39

Sumber: Data olahan tahun 2017

Tabel 4. menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi masyarakat. Diperoleh data bahwa rata-rata sebanyak 61% menyatakan Ya, dilihat dari jawaban yang menjawab Ya tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada sub indikator mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa yaitu sebesar 67%. Sedangkan rata-rata sebanyak 39% menyatakan Tidak, dilihat dari jawaban yang menjawab Tidak tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada sub indikator mengembangkan kultur demokrasi yaitu sebesar 45%. Berdasarkan hasil penelitian dan tolak ukur, bahwa sebanyak 61% responden menjawab ya berada dalam kategori baik yang terletak antara 51% - 100%, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada upaya Pemerintah Kampung Pinang Sebatang untuk membangun demokratisasi desa.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan pemerintah kampung yang menyatakan Ya berpendapat bahawa ada upaya pemerintah kampung Pinang dalam membangun demokratisasi desa, seperti adanya rembug kampung atau musrembang,

serta pemilihan Penghulu dan BAPEKAM secara independen dan demokratis. Sedangkan responden yang menyatakan Tidak berpendapat bahwa kurang ada upaya pemerintah kampung Pinang dalam membangun demokratisasi desa. Seperti kurangnya keterbukaan dalam penetapan calon anggota BAPEKAM dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Penghulu.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis tentang prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang menurut persepsi pemerintah kampung berada dalam kategori baik (51% - 100%), dengan perolehan persentase sebesar 96%.
2. Pelaksanaan prinsip demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Pinang Sebatang menurut persepsi masyarakat berada dalam kategori baik (51% - 100%), dengan perolehan persentase sebesar 69%.
3. Upaya Pemerintah kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi pemerintah kampung berada dalam kategori ada upaya (51% - 100%), dengan perolehan persentase sebesar 96 %.
4. Upaya Pemerintah kampung Pinang Sebatang dalam membangun demokratisasi desa menurut persepsi masyarakat berada dalam kategori ada upaya (51% - 100%), dengan perolehan persentase sebesar 61%.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kampung Pinang Sebatang, penulis mengharapkan Pemerintah Kampung Pinang Sebatang mempertahankan dan mengembangkan pelaksanaan prinsip demokrasi yang tergolong baik. Bagian terpenting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan yang baik antara Pemerintah Kampung, BAPEKAM, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Masyarakat. selanjutnya dalam menjalankan pemerintahan diperlukan prinsip transparansi (keterbukaan) informasi, baik mengenai kebijakan, rekrutmen perangkat kampung, anggaran dan rencana pembangunan.
2. Kepada masyarakat kampung Pinang sebatang, sangat diperlukan adanya pengawasan dan partisipasi terhadap Pemerintah Kampung Pinang Sebatang dalam pelaksanaan prinsip demokrasi agar pembangunan kampung sesuai dengan

kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam keseharian masyarakat diperlukan demokratisasi yang dikembangkan dari tradisi kampung sesuai dengan pola sosio budaya masyarakat kampung itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Pd, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Drs. Kamarudin Oemar, M.Si, selaku ketua jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, sebagai Koordinator Program studi PPKn Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Selaku Penasehat Akademik penulis dan selaku Pembimbing I yang turut memberikan bimbingan dan arahan selama proses pendidikan.
4. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH Selaku Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan membantu kesulitan yang dihadapi penulis selama proses pendidikan.
5. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau (Bpk.Dr. Hambali, M.Si), (Bpk.Drs. Zahirman, MH), (Bpk Supentri, M.Pd), (Bpk. Drs Ahmad Eddison, M.Si), (Bpk. Saparen S.Pd, MH), (Bpk Haryono, M.Pd) terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bekal di masa sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudjana. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Bumi Askara
- Busrizalti. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan; Negara Kesatuan, HAM & Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Total Media
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Askara
- Marijan Kuncung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana

Marwan Jaffar, dkk. 2015. *Buku 3 Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sugiyono. 2015. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-undang:

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 7 Tahun 2010 tentang perubahan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung